



23. Urusan Kebudayaan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan Jasa Surat-menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Langganan
 - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i) Penyediaan Makan dan Minum Rapat
 - j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
 - l) Pengelolaan Dokumen SKPD
 - m) Penyediaan Jasa Langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Penyusunan Dokumen Kepegawaian
- 4) Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan
 - a) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
 - b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan
 - d) Penyusunan Profil Data SKPD Lima Tahun Terakhir



- 5) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - a) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
 - b) Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah.
 - c) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
- 6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - a) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - b) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
 - c) Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah
 - d) Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
 - e) Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
- 7) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - a) Penyelenggaraan dialog Kebudayaan
 - b) Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
 - c) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 - d) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat 12 bulan, 1.428 surat masuk, 2.053 surat keluar, 1.604 undangan masuk, 424 undangan keluar, 16 Surat Keputusan (SK), 191 ijin.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan 12 bulan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan
 - f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan



-
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan
 - i) Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan
 - k) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan
 - l) Pengelolaan dokumen SKPD 12 bulan
 - m) Penyediaan Jasa Langganan 12 bulan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit gedung kantor 12 bulan
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8 unit roda 4, 13 unit roda 2 selama 12 bulan
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 20 unit, 12 bulan.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Dokumen kepegawaian 87 orang
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan
- a) Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 dokumen, 12 bulan
 - b) Laporan keuangan dan realisasi keuangan selama 12 bulan 12 buku
 - c) Renja SKPD, RKA dan DPA 3 dokumen
 - d) Profil data SKPD lima tahun terakhir 1 dokumen, 10 eksemplar
- 5) Program Pengembangan Nilai Budaya
- a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah yang meliputi :
Fasilitasi dan aktualisasi upacara adat 10 kali/ lokasi, fasilitasi tradisi budaya 20 lokasi, upacara merti dusun 5 lokasi, dan sosialisasi nilai-nilai budaya bagi masyarakat 1 kali.
 - b) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah berupa draft raperda cagar budaya 1 draft 25 eksemplar.



-
- c). Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya yakni pembinaan dan pemberian dukungan penghargaan rumah tradisional 5 rumah dan dukungan pendampingan terhadap cagar budaya yang telah ditetapkan 6 cagar budaya.
- 6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- a) Fasilitasi dan pembinaan desa berbudaya 4 desa, sosialisasi dan pemahaman nilai-nilai budaya melalui mocapat 8 kali, pembinaan nara karya 2 kali, pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan 2 kali, pendampingan kecamatan sebagai pusat pelestarian dan pengembangan kebudayaan di 17 kecamatan, pembinaan 12 lembaga budaya, pengiriman festival prajurit nusantara 1 kali, pelatihan MC (Master Of Ceremony) bahasa Jawa untuk perangkat desa 1 kali, pelathan sesorah bahasa Jawa 3 kali. Fasilitasi kesenian bagi 500 orang seniman, pengembangan kesenian 3 kali, pembinaan sanggar 5 kali, mengikuti acara Adeging Nagari Yogyakarta di Jakarta 1 kali, pagelaran seni karawitan, badui, tari punglor, jathilan, keroncong mendukung *event* khusus 5 kali, pentas seni 58 kali pentas (jathilan, campursari, band, orkes melayu) rutin di obyek dan daerah wisata (ODTW) 55 kali, revitaslisasi seni wayang topeng, pagelaran seni tradisional 10 kali (kethoprak, tari angguk, reyog keprajuritan, wayang golek, calung, hadroh, kuntulan, wayang wong, jeber juwes menak budaya) di gedung kesenian. Lomba mewarnai, melukis dan dongeng budaya daerah dan lomba menulis cerita budaya daerah 1 kali diikuti oleh 700 peserta.
- b) Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah berupa kemah budaya bagi siswa 1 kali, dan sosialisasi cagar budaya pada masyarakat 2 kali.
- c) Perekaman dan pendokumentasian kegiatan *live circle* sebagai bahan pustaka 1 kali.
- d) Pengelolaan lingkungan makam pahlawan dan pemeliharaan makam pahlawan di 2 lokasi, dan pemeliharaan *tetenger*/monumen perjuangan dan museum di 33 lokasi, pameran 8 museum dan



pameran potensi daerah, pengelolaan lingkungan museum pada 2 museum dan pelatihan teknis museum 1 kali.

- e) Pelaksanaan inventarisasi bangunan warisan budaya dengan hasil 50 buku buku/ dokumen tentang daftar bangunan warisan budaya dan tradisi budaya yang berada di 17 kecamatan 50 buku.

7) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- a) Forum pelestarian budaya dan dialog budaya 1 kali.
- b) Pemberian fasilitasi bagi Dewan Kebudayaan Sleman 1 kali, festival budaya daerah 1 kali, pengadaan 60 buah pakaian bregodo tradisional dan 35 buah seragam kelompok mocapat. Fasilitasi seni dan budaya bagi 10 grup jathilan, pembinaan dan pelatihan seni kethoprak 1 kali, repertoar tari peksi eka kapti 1 kali.
- c) Pengiriman festival sendratari tingkat propinsi DIY 1 kali, Festival kethoprak tingkat Propinsi DIY 1 kali, penyelenggaraan Festival Kesenian Sleman (FKS), mengikuti acara Gelar Pesona Budaya Nusantara di Jakarta 1 kali, pengiriman peserta festival dolanan anak tingkat Propinsi DIY, pengiriman 2 kontingen ke Festival Kethoprak Lesung tingkat Propinsi DIY, pengiriman festival reyog dan Jathilan Tingkat Propinsi DIY, pengiriman peserta pada acara Festival Reyog dan Jathilan Tingkat Propinsi DIY, pengiriman gelar seni pertunjukan tingkat Propinsi DIY 1 kali, pengiriman parade tari daerah ke Propinsi DIY 1 kali, dan lomba cipta tari 1 kali.
- d) Pengadaan pakaian jawa bagi 4 kelompok kesenian.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan sebagaimana buku lampiran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No. PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian, capaian SPM khususnya bidang kesenian sebagai berikut:

Tabel 3.50. Pencapaian SPM Bidang Kesenian Tahun 2014

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Target	Batas waktu	Target Sleman 2014	Capaian
1.	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian				
	a. Cakupan Kajian Seni	50%	2014	50%	86,67%
	b. Cakupan Fasilitas Seni	30%	2014	30%	100 %
	c. Cakupan Gelar Seni	75%	2014	75%	100%
	d. Cakupan Misi Kesenian	100%	2014	100%	100%
2.	Sarana dan Prasarana				
	a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	25%	2014	25%	100%
	b. Cakupan Tempat	100%	2014	100%	100%
	c. Cakupan Organisasi	34%	2014	34%	100%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pelestarian budaya yang hidup di masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal ini antara lain tercermin dalam upacara adat dan tradisi merti dusun/desa yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman. Data upacara adat dan merti dusun di Kabupaten Sleman sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 3.51. Data Upacara Adat di Kabupaten Sleman Tahun 2014

No	Kegiatan	Tempat	Pelaksanaan
1.	Upacara Adat Mbah Bregas	Ngini, Margoagung, Seyegan	16 Mei 2014
2.	Upacara Adat Labuhan Merapi	Kinahrejo, Umbulharjo, Cangkringan	30 Mei 2014
3.	Upacara Adat Tunggul Wulung	Tengahan, Sendangagung, Minggir	22 Agustus 2014
4.	Upacara Adat Tuk Si Bedug	Mranggen. Margodadi, Seyegan	25 Juni 2014
5.	Upacara Adat Suran Kaliurang	Kaliurang, Hargobinangun, Pakem	24 Oktober 2014
6.	Upacara Adat Mbah Demang	Banyuraden, Gamping, Sleman	31 Oktober 2014
7.	Upacara Adat Bathok Bolu	Purwomartani, Kalasan, Sleman	2 November 2014
8.	Upacara Adat Wonolelo	Padukuhan Pondok Desa Wonolelo, Ngemplak	28 november 2014
9.	Upacara Adat Saparan Bekakak	Ambarketawang, Gamping	5 Desember 2014
10.	Upacara Adat Tunggul Arum	Tunggul Arum, Wonokerto, Turi	17 Desember 2014

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 3.52. Data Tradisi Merti Dusun/Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2014

No	Upacara Adat	Lokasi	Pelaksanaan
1	Merti Dusun Soromitan	Sendangarum, Minggir	4 Januari 2014
2	Merti Dusun Pulesari	Pulesari, Wonokerto, Turi	5 Januari 2014
3	Merti Dusun Kalirase	Kalirase, Trimulyo, Sleman	5 Januari 2014
4	Merti Dusun Drono	Drono, Tridadi Sleman	11 Januari 2014
5	Merti Dusun Kwagon	Kwagon, Sidorejo, Godean	16 Februari 2014
6	Merti Dusun Ngliran	Ngliran, Sendangagung, Minggir	23 Februari 2014
7	Merti Dusun Nganggring	Nganggring, Girikerto, Turi	10 Februari 2013
8	Merti Dusun Nawung	Nawung, Gayamharjo, Prambanan	12 April 2014
9	Merti Dusun Donoharjo	Donoharjo, Ngaglik	20 April 2014
10	Merti Dusun Argomulyo	Argomulyo, Cangkringan	27 April 2014
11	Merti Dusun Nambongan	Nambongan, Caturharjo, Sleman	16 April 2014
12	Merti Dusun Nglebeng	Nglebeng, Margorejo, Tempel	15 Juni 2014
13	Merti Dusun Batang	Batang, Tambakrejo, Tempel	24 Juni 2014
14	Merti Dusun Watugajah	Watugajah Sendangagung, Minggir	22 Juni 2014
15	Sadranan Makam Wot Galeh Sendangtirta	Wot Galeh, Sendangtirta, Berbah	15 Juni 2014
16	Merti Dusun Pamidangan	Pamidangan, Margodadi, Seyegan	26 Juni 2014
17	Sadranan Kemiri	Kemiri, Margorejo, Tempel	27 Juni 2014
18	Sadranan Lungguh	Lungguhrejo, Wonokerto, Turi	15 Juni 2014
19	Merti Dusun Ketingan	Ketingan, Tirtoadi, Mlat	26 Oktober 2014
20	Mertidusun Ngajek	Ngajek, Tirtomartani, Kalasan	9 Agustus 2014
21	Merti Dusun Gumbulgedhe	Selomartani, Kalasan	25 Oktober 2014
22	Merti Dusun Margodadi	Margodi, Seyegan	21 Juni 2014
23	Merti Dusun Wiwit Margoluwh	Klino, Margoluwh, Seyegan	20 September 2014
24	Merti Dusun Margo Agung dan Margokaton	Desa Margo Agung dan Margokaton Seyegan	3 Juni dan 26 September 2014

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Upaya pelestarian dan pengembangan berbagai seni budaya lokal maupun nasional dilakukan melalui berbagai pembinaan kelompok kesenian. Pembinaan tersebut antara lain pembinaan group kesenian Jathilan untuk pentas seni di Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), pembinaan group kesenian elektone untuk pentas seni di ODTW, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan festival kethoprak tingkat kabupaten maupun provinsi. Disamping itu pemerintah daerah secara bertahap menyediakan seperangkat gamelan untuk semua kecamatan guna pengembangan seni budaya di masyarakat.

Berbagai program dan kegiatan dalam urusan kebudayaan dapat ditunjukkan oleh prestasi/penghargaan yang diraih oleh pelaku seni dan budaya adalah:

1. Juara Umum Festival Prajurit Tradisional Nusantara Tingkat Nasional atas nama Prajurit “Bathok Bolu” alamat Kalasan, Sleman, yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.
2. Juara I Festival Langen Carito Tingkat Provinsi DIY atas nama Hajar Wisnu Satoto, alamat Mutihan, madurejo, Prambanan, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.
3. Juara harapan II Festival Kethoprak Lesung Tingkat Provinsi DIY atas nama Group “Ketoprak Lesung Projayan” alamat Projayan, Wonokerto, Turi, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.
4. Juara II Parade Tari Tingkat propinsi DIY, atas nama Listyaningrum, alamat Mesan, Sinduadi, Mlati, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.
5. Juara I Penata tari Gelar seni Pertunjukan DIY atas nama Setiawan Jalu Pamungkas alamat Glondong, Tirtomartani, Kalasan, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.
6. Juara I Festival Sendratari Tingkat Propinsi DIY atas nama Feri Catur H,SPd alamat Pakem, Tamanmartani, Kalasan, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.
7. Juara IV Festival Kethoprak tingkat DIY, atas nama Komunitas kethoprak Sleman “LULUH”, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Penyelenggara urusan Kebudayaan adalah Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi serta Bidang Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia penyelenggara urusan kebudayaan berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi sebanyak 10 orang, dan Bidang Kesenian sebanyak 10 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kebudayaan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kebudayaan sebesar Rp4.913.622.250,00 terealisasi sebesar Rp3.268.529.054,00 atau sebesar 66,52 %. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp626.726.500,00 realisasi Rp 543.447.002,00 atau 86,71%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp341.668.250,00 realisasi Rp299.663,152 atau 87,71%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp28.991.000,00 realisasi Rp28.877.000,00 atau 99,61%
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan sebesar Rp107.275.000,00 realisasi Rp104.929.000,00 atau 97,81%
5. Program Pengembangan Nilai Budaya sebesar Rp350.900.000,00 realisasi Rp348.068.000,00 atau 99,19%
6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebesar Rp1.082.178.500,00 realisasi Rp1.069.360.200,00 atau 98,53%
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya sebesar Rp 2.375.883.000,00 realisasi Rp874.174.700,00 atau 36,79%.



f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan ini dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

Program dan kegiatan dalam urusan kebudayaan dirumuskan berdasarkan padapermasalahan dan rencana pengembangan potensi dan disusun menjadi prioritas prioritas pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah dan mengoptimalkan potensi. Perumusan program diupayakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (Dewan Kesenian, Perkumpulan Karawitan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Badan Pengelolaan Cagar Budaya, Akademisi, Budayawan, Pelaku Budaya dan Pengamat Budaya) sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya mampu menjawab permasalahan dalam urusan kebudayaan dan merupakan kebutuhan riil masyarakat.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya di Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi dan Bidang Kesenian adalah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Sebagian kalangan generasi muda dalam bersikap dan berperilaku telah mulai melupakan nilai-nilai budaya dan unggah ungguh Jawa. Solusi yang dilakukan adalah memperbanyak kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Sleman.

24. Urusan Statistik

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik
 - a) Pengolahan updating dan analisis data PDRB
 - b) Penyusunan buku PDRB Kecamatan
 - c) Penyusunan buku statistik harga bahan bangunan
 - d) Penyusunan buku inflasi
 - e) Penyusunan buku statistik industri
 - f) Penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - g) Penyusunan buku Kabupaten dan kecamatan dalam angka
 - h) Penyusunan buku indikator kesejahteraan rakyat
 - i) Penyusunan buku Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D)
 - j) Penyusunan meta data spasial Kabupaten Sleman
 - k) Penyusunan Indeks pembangunan gender
 - l) Penyusunan Buku Indeks Gini
 - m) Penyusunan profil dan indikator kependudukan
 - n) Penyusunan indeks Nilai Tukar Petani (NTP)
 - o) Updating dan Validasi Data Keluarga Berencana (KB)
 - p) Updating Dan Validasi Data Kemiskinan
 - q) Penyusunan Profil Desa



- r) Penyusunan Monografi Kecamatan
- s) Pengolahan updating dan analisis data statistik daerah
- t) Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
- u) Updating dan validasi data ketenagakerjaan dan sosial
- v) Pengolahan dan updating data sistem informasi manajemen pemerintah desa
- w) Pemutahiran /update data toponimi kecamatan
- x) Analisa program pembangunan

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan Statistik adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah
 - a) Buku updating dan analisis data PDRB berdasarkan lapangan usaha tahun 2013 sejumlah 100 buku dan data PDRB berdasarkan penggunaan sejumlah 100 buku
 - b) Penyusunan buku PDRB Kecamatan tahun 2013 sejumlah 100 buku
 - c) Penyusunan buku Statistik Harga Bahan Bangunan tahun 2013 sejumlah 50 buku
 - d) Penyusunan Buku Inflasi tahun 2014 per triwulan 300 buku
 - e) Penyusunan Buku Statistik Industri tahun 2013 sejumlah 50 buku
 - f) Penyusunan buku IPM tahun 2013 sejumlah 80 buku.
 - g) Penyusunan Buku Kabupaten dalam Angka 400 buku dan Kecamatan dalam Angka 1.530 buku
 - h) Penyusunan buku indikator kesejahteraan rakyat tahun 2013 sejumlah 80 buku
 - i) Penyusunan buku Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)/PDP3D 50 buku, pengumpulan, pegkajian dan pengamanan data 12 bulan dan *updating* data SIPD Kemendagri 2 kali
 - j) *Update* Simpul jaringan 1 web dan data spasial 5 dokumen.
 - k) Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Gender tahun 2013 sejumlah 80 buku

- l) Penyusunan Buku Indeks Gini tahun 2013 sejumlah 50 buku
- m) Penyusunan dokumen profil, indikator dan analisa kependudukan 100 buku
- n) Penyusunan data Nilai Tukar Petani Kabupaten Sleman (NTP) 30 buku
- o) Update data Sistem Informasi Manajemen Pedesaan (SIMPEDES) 2 kali 17 kecamatan, pengelolaan manajemen pemerintahan desa 80 desa 2.112 orang 32 kali.
- p) Kajian penamaan jalan dan prasarana publik 1 dokumen dan kode dan data wilayah pemerintahan kabupaten sleman sebagai bahan penyusunan Permendagri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan tahun 2014 sejumlah 1 dokumen
- q) Operasional petugas pengumpul data statistik pertanian, perikanan 12 bulan
- r) Updating data Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur (PUS), peserta kelompok umur sasaran, analisa data KB di 86 desa dan sarasehan 1 kali
- s) Validasi Data Kemiskinan 1.212 padukuhan, 12 desa 17 kecamatan, cetak kartu miskin 107.000 lembar, pengembangan dan pemeliharaan SIM kemiskinan 1 paket.
- t) Pendampingan penyusunan profil desa 19 kali di 17 kecamatan 86 desa dan data profil desa 135 eksemplar.
- u) Penyusunan Monografi Kecamatan di 17 kecamatan 122 eksemplar.
- v) Validasi dan updating data ketenagakerjaan dan sosial 17 kecamatan 86 desa.
- w) Validasi dan updating industri Kabupaten Sleman 40 buku, Buku Direktori dan data base koperasi 50 buku, Profil Perusahaan Legal tahun 2013 sejumlah 150 buku, pengelolaan sub domain Disperindagkop 12 bulan, data toko modern 40 buku, data base ekspor impor 1 data base, data pelaku usaha dagang 1 data base.

- x) Data dan informasi program dan kegiatan pembangunan tahun 2014 dan laporan koordinasi program pembangunan 1 dokumen 12 bulan.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Penyelenggara urusan statistik adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan urusan statistik didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, dan Kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut sebagaimana lampiran I.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan statistik secara rinci menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana lampiran I.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik melalui Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah sebesar Rp2.617.904.050,00 dan realisasi sebesar Rp2.522.857.941,00 atau sebesar 96,37 %

f. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan statistik yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Sleman, Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kecamatan sebagaimana lampiran I.

g. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan ini dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

h. Permasalahan dan Solusi

-